

RISALAH
RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : Senin
Tanggal : 25 November 2019
Pukul : 15.30 Wib
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bintan
Acara : Penutupan Masa Sidang I Tahun 2019

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Agus Hartanto, ST
3. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
4. Muhamad Najib
5. Mirwan
6. Zakirman, S.Pd.I
7. Hasriawady, S.IP
8. Suhardi, SE
9. Eriyanti, SH, MH
10. Sahak
11. Eddy Tiawarman, SP
12. Tarmizi
13. Zulkifli, S.Pd
14. Hj. Sri Wahyuni, S.Sos
15. Arwan
16. Muttaqin
17. Bani Suparti, A.Md
18. Hj. Aisyah
19. Yanti Maryanti
20. Suardi, S.Sos

Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, MM

JALANNYA RAPAT

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan.

Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih dapat berkumpul kembali dan hadir

bersama-sama diruangan ini dalam rangka menyelenggarakan rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Bintan dengan acara : **Penutupan Masa Sidang ke I Tahun 2019**. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.

.....Palu diketok 3 (tiga) kali.....

Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan Masa Reses tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 25 November s/d Sabtu 30 November 2019 selama 6 hari kerja sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan. Masa reses dipergunakan oleh setiap Anggota secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya, guna menyerap aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan Pasal 98 Ayat 4 yang menyatakan bahwa setelah selesai reses setiap Anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugas pada masa reses untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, hal ini perlu saya sampaikan mengingat hasil reses ini akan kita sampaikan kepada Pemerintah Daerah pada agenda Musrenbang Kabupaten Bintan pada Februari Tahun 2020 mendatang, dan akan dibahas bersama-sama untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya pada saat pembukaan Masa Sidang II diharapkan hasil aspirasi masyarakat yang didapatkan pada saat pelaksanaan kegiatan reses ini dapat diserahkan kepada Pimpinan saat Paripurna nanti.

Sebelum kita tutup saya akan mendengarkan pendapat dan saran dari rekan-rekan Anggota. Silahkan kepada Anggota untuk memberikan masukannya. Silahkan pak Muttaqin.

Muttaqin/ Anggota Komisi II :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan serta pak Setwan yang saya hormati. Kami menginginkan sebelum kita melaksanakan Reses ada catatan-catatan yang perlu kita sampaikan/informasikan kepada konsituen. Inikan reses yang pertama, artinya selama masa sidang pertama itu apa saja produk yang sudah disampaikan oleh Pemda kepada DPRD, sehingga ini mungkin nanti bisa menjadi bahan teman-teman ketika turun kelapangan.

Begitu juga mungkin ada beberapa hal kebijakan-kebijakan yang belum diketahui oleh teman-teman lainnya. Misalnya dalam hal Struktur APBD 2020, teman-teman yang sebagian yang tidak duduk di Banggar mungkin belum dapat Struktur APBD 2020. Mungkin tidak ada salahnya dari Setwan untuk mengcopy Struktur APBD 2020 sehingga teman-teman meskipun tidak di Banggar mereka bisa menyampaikan bahwasanya inilah rencana APBD 2020. Artinya ada bahan yang perlu disampaikan tetapi kalau tidak ada bahan tersebut kami rasa mohon maaf bingung juga apa yang mau disampaikan.

Disatu sisi kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kinerja kita, tetapi disisi lain kita juga mendapatkan informasi terhadap kondisi yang ada dilapangan. Jadi itu yang ingin kami sampaikan Pimpinan, sebetulnya dari dulu ketika kita menutup masa sidang maka ada catatan-catatan yang sudah kita lakukan selama kita melakukan masa sidang itu, jadi sebelum reses kita sudah punya bahan-bahan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu masukan dari kami, Pimpinan. Terima kasih.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih pak Muttaqin, ini masukan yang sangat baik sekali. Kalau masalah kewajiban dan tanggung jawab sudah kita sampaikan kepada Anggota yang baru beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh pak Muttaqin tadi, tolong nanti pak Setwan di copy rencana APBD 2020 sehingga setiap mau reses ada kata pembukaan dan kita punya dasar bahwasanya APBD kita itu tahun 2020 berjumlah sekian.

Nanti kita minta Pimpinan untuk tahun 2021 diadakan pendekatan dengan Bupati terkait dengan Pokir. Nanti kita sama-sama minta dari Fraksi masing-masing, untuk tahun 2021 itu pokir Anggota dapat berapa. Silahkan kalau ada yang lain ? Silahkan pak Tarmizi.

Tarmizi/Anggota Komisi I :

Assalamu'alaikum warhamtullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pimpinan Rapat beserta Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang saya hormati pak Setwan beserta stafnya. Saya ingin bertanya masalah reses antara lain :

1. Apabila reses ini dilapangan kita cuma mampu melakukan 3 kali atau 4 kali. namun ketentuan harus 6 kali, ini bagaimana Ketua.
2. Bagi kami yang baru tentu harus ada pedoman tata cara dalam reses, apa saja yang harus kita pertanyakan kepada masyarakat, ini kami juga belum tahu.
3. Apakah nanti diakhir tahun ada rincian kepada Anggota DPRD selama dari bulan Januari hingga akhir tahun ini Bapak Setwan akan menyampaikan kepada Dewan bahwa Anggaran di tahun 2019, misalnya berjumlah 6 milyar, ini kemana saja. Saya menginginkan ada rincian bahwa di tahun 2019 dihabiskan untuk misalnya DL orangnya siapa-siapa saja berikut pendampingnya juga siapa-siapa saja, jumlahnya berapa, kemudian Dinas Dalam dan sebagainya. Saya contohkan misalnya kami ini sebagai pemilik rumah di Dewan tapi sampai saat ini saya sendiri tidak tau berapa harga kue kotak ini. Sama seperti hal lainnya kami disuruh mengukur baju batik tapi kami tidak tahu berapa harganya. Disini kami melihat tidak ada transparan. Jadi bagaimana fungsi Dewan sebagai fungsi pengawasan, sedangkan di dalam Dewan sendiri tidak bisa diawasi. Terkesan Dewan seperti anak SD, kamu saya kasih baju, sudah diam, tidak perlu tahu harganya. Sementara disini adalah anggaran Dewan, kenapa kita yang punya anggaran kita tidak bisa tahu.
4. Masalah Banggar, dimana pada saat Paripurna saya sempat bingung ditanya oleh Pimpinan apakah kita setuju atau tidak dalam pengesahan, sementara kami tidak dilibatkan tidak masuk dalam Komisi, terus kami ditanya setuju atau tidak, kami mau jawab apa. Setuju gak tau apa yang disetujui, nak dijawab tidak setuju apa yang tidak disetujui. Kalau boleh saran dikembalikan lagi kepada Tatib, tolong direvisi dalam arti kata setiap pembahasan agar dikembalikan dulu kepada Komisi. Dimana study banding kami dibeberapa daerah kami menanyakan dimana ditempat-tempat lain pembahasan dikembalikan dulu ke Komisi. Artinya kalau dibahas di komisi kita pahan bahwa Dinas-Dinas ini mempunyai anggaran berapa, sehingga kita bisa mengawasi, kalau seperti ini kita seperti kambing congek saya lihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi fungsi Dewan sebagai pengawasan, penganggaran dimana. Jadi fungsi Dewan sebagai pengawas tidak melekat di diri kita, terima kasih Ketua. Wassamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih pak Tarmizi. Yang pertama mungkin nanti PPTK yang menjawab, mungkin dengan membentuk kelompok. Saya coba menjawab yang nomor 4 bahwa kalau membahas anggaran kita terikat dengan aturan. Setiap Anggota banggar terdiri dari Ketua Fraksi, sekarang Bapak Ketua Fraksinya bapak Indra Setiawan, jadi bapak harus tanya kepada pak Indra Setiawan, bapak harus kejar bola, kan ada perwakilan tiap Fraksi. Semuanya, PKS ada, Golkar juga ada. Pak Hasriawady tanya ke saya, Ibuk Fiven nanti buk Fiven yang akan menjelaskan karena beliau Anggota Banggar. Kalau tidak masalah dengan aturan lebih bagus jika memang Komisi membahas.

Kita harus pertanyakan dulu dimana ada yang sudah menggunakan peraturan yang baru, ada yang masih belum, nah sanksi inilah yang mau kita lihat. Memang ada beberapa tempat yang masih membahas di Komisi namun didalam peraturan terbaru mengatakan bahwa apabila diragukan bisa bertanya minta bantu kepada komisi. Bapak juga nanti tahun bisa jadi Anggota Banggar, karena biasanya bergantian. Misalnya Golkar ada 6 orang, disitu nanti akan bergantian menduduki sebagai perwakilan di Banggar, sedangkan Ketua atau unsur Pimpinan otomatis masuk di Banggar. Kita juga sudah pertanyakan, nanti kalau kita Bimtek kita minta perjelas jangan nanti ada sanksi. Kalau kita terlambat malahan tidak ada sanksi sekarang ada sanksi. Apabila pengesahan APBD lewat dari tanggal 30 November pengesahannya akan ada sanksi. Sanksinya ke adalah Bupati baru DPRD, makanya kalau tidak ada pak Ketua DPRD tetap jalan karena ada wakil ketua.

Kita ada dikasih buku oleh pak Mukjizat dan pak Setwan copy lalu dibagikan kepada Anggota untuk dibaca, sehingga kita bekerja berdasarkan payung hukum dan tata tertib. Mudah-mudahan pembahasan 2021 atau anggaran perubahan 2020 bisa jelas, sebetulnya bukan di RKA tapi KUA dan PPAS, apalagi sekarang sudah e-planing, budgeting kita ini sudah dikunci. Insya Allah nanti kita Bimtek akan kita pertanyakan dan perjelas, biar sama-sama puas. Kalau kita tanya Natuna itu masih menggunakan cara lama dibahas di Komisi, karena Bintang ini selalu nomor 1 tapi gaji paling bawah, itu tergantung kekuatan keuangan daerah.

Kalau masalah Perjalanan Dinas, saya rasa ini semua sudah dibagi per komisi, ini sudah bagus, Komisi 1 berapa, Komisi 2 berapa dan Komisi 3 berapa semua menggunakan Standar Satuan Harga (SSH). Memang SSH Bintang itu paling kecil, kalau kita baju Safari saja 1.100 lebih rupiah, penjahitnya di Royal, Dewan lain saja hampir 2 juta rupiah. Terkait uang makan minum ini nanti kita transparan ya pak Setwan, nanti agar dilampirkan berapa harga dan berapa jumlah pesanan, ini bukti pengawasan kita, begitu ya pak Tarmizi, saya pikir biar sama-sama enak. Kalau masalah 6 hari tapi Cuma bisa melaksanakan 3 atau 4 hari itu PPTK yang jawab, silahkan pak Roni.

Rony Frantika, S.Sos / Kasubbag Fasilitasi :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saya akan coba menjawab pertanyaan pak Tarmizi. Prinsip kerja kami adalah memfasilitasi, artinya kami mempersiapkan sesuai dengan Tatib yang ada artinya 6 kali. Kalau untuk Anggota itu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan. Jadi aturannya ada di Pimpinan, kalau kami tetap mempersiapkan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan tatib. Jadi kalau 6 kali resesnya maka 6 kali yang kami siapkan, kalau masalah biasanya itu ada di Pimpinan, kami tidak masuk ke ranah itu pak, demikian.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Saya rasa kalau kita sudah reses 6 kali, kita terima uang seperti sewa tempat dan lain-lain itu sebanyak 6 hari, jadi kalau kita melaksanakan hanya 3 atau 4 kali harus dipertanyakan dulu nanti kita jawab boleh sementara yang lain semua 2 kali, nanti kita juga yang susah. Saya cuma mau kasih tau bahwa kalau kita 10 juta rupiah keluar 1 milyar itu prinsip.

Tarmizi / Anggota Komisi I :

Izin Ketua

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Iya, silahkan

Tarmizi / Anggota Komisi I :

Maksudnya begini, kalau kita bisa melaksanakan cuma 3 kali apakah pembayarannya itu juga 3 kali, sisanya terpotong atau apakah ini dibulatkan full dibayarkan 6 kali atau tidak sama sekali.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Daripada kita melaksanakan 3 kali, mending seperti saya tidak melaksanakan reses sama sekali daripada ini nanti merusak ke semua, repot kita. Contoh kami pernah kena, berangkat pergi pagi pulang sore padahal harus menginap, akhirnya semua diperiksa oleh Jaksa. Jadi lebih baik kalau reses 6 kali kita cuma bisa 3 kali lebih bagus tidak usah ikut reses biar semua aman, Pimpinan aman, Setwan aman, pendamping juga aman. Tapi boleh juga menampung aspirasi secara pelan-pelan, nanti kita masukan dalam musrenbang.

Muttaqin / Anggota Komisi II :

Izin Pimpinan, biar jelas kenapa bisa 6 kali kenapa bisa 420 konsituen. Dulu pertama kali reses hanya 5 kali, sekali pertemuan hanya 40 orang, jadi 5 x 40 orang Cuma 200 orang. Kemudian ada tuntutan dari anggota waktu itu, kalau cuma 200 orang kita yang tekor karna kadang-kadang yang datang itu banyak. Kemudian ditambahlah konsituennya menjadi 50 orang lalu harinya ditambah 1 hari maka jadilah 300 orang. Kemudian teman-teman mengeluh lagi, diundang 50 orang yang datang 100 orang, tekor juga kita. Maka ditambahlah konsituen itu menjadi 70 orang.

Jadi sebenarnya angka-angka tersebut adalah keinginan Anggota, kalau memang mungkin periode ini angka tersebut terlalu besar ataupun harinya terlalu banyak nanti bisa kita diskusikan gimana nyamannya teman-teman. Artinya tidak ada yang merasa keberatan dan apa yang menjadi tupoksi kita karna memang kewajiban untuk melakukan reses ini dibiayai oleh APBD artinya kalau tidak melaksanakan reses tentunya tidak akan dibayar, begitu prinsipnya. Itulah kronologinya, waktu itu 5 hari cuma 40 orang. Prinsip ini memang keinginan teman-teman waktu dulu, tapi kalau memang periode ini teman-teman ada pemikiran yang yang lain kami rasa tidak ada masalah, mungkin itu masukan dari kami Pimpinan. Terima kasih.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih pak Muttaqin atas masukannya. Jadi begini pak Tarmizi hari ini kan kita sudah mulai reses, kalau nanti kita kurang itu tidak etis, untuk sekarang ini kita jalankan seperti ini. Nanti kita adakan pertemuan kembali, sama-sama kita ambil kesepakatan

bersama baru kita ajukan, kalau perlu dikurangi ya kita kurangi tapi duitnya juga kita kurangi, begitu y pak Tarmizi. Selanjutnya silahkan pak Mirwan.

Mirwan / Anggota Komisi I :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pimpinan. Yang pertama saya ingin menyampaikan berkenaan apa yang Pimpinan sampaikan tadi ada Anggota yang reses dan ada Anggota yang tidak reses, tentu ada konsekwensi. Yang ingin saya tanyakan apakah kalau kita tidak melaksanakan reses itu, pikir kita tetap terakomodir ? ini perlu kita kaji bersama-sama jangan samapi nanti timbul salah persepsi diantara kita, mohon penjelasannya Pimpinan. Kemudian yang kedua apa yang disampaikan pak Muttaqin tadi yang saya pahami tidak tau kalau berbeda kalau jumlahnya saya rasa kurang 420 itu. Saya mungkin di Kabupaten bintang yang suaranya sedikit, pak.. 800 orang juga, tidak bisa saya akomodir 420 orang bagaimana dengan bu Erik yang 2200 orang. Yang jadi masalahnya bukan jumlah orangnya tetapi kami mau mengadakan itu setelah kami hitung-hitung biayanya yang tidak cukup. Tapi kalau bisa diakomodir 800 ditambah pembiayaannya kami pun siap, mau 2 minggu pun reses kami siap dan itu lebih baik karna kita difasilitasi, itulah kesempatan kita.

Yang menjadi permasalahan hari ini, kami diminta dengan jumlah konsituen 420, dananya kita hitung kalau konsituennya 800 kemungkinan kita nombok. Tapi sebenarnya kalau kita sepakat semua, melakukan reses dengan target yang sama dengan sistem yang sama saya rasa tidak ada masalah. Yang timbul masalah itu begini Pimpinan, rasa reses cuma menyiapkan kue kotak, cua siapkan nasi, tiba-tiba ada kawan kita yang punya rezeky menggunakan sembako harga 50,000,- dapat juga nasi dan kue kotak, apa kata konsituen saya, achh,, tak betol nih pak Mirwan, disana dapat kue kotak dan nasi lalu dapat lagi sembako seharga 50,000 sehingga timbul niat saya mau ngasih juga 50.000 nanti ada pula lagi yang disebelah saya dapat sembako dapat lagi uang saku, ini yang kita tidak sanggup.

Jadi saran saya kalau bisa kita sepakati saja, kita bolehkan seperti apa dan yang tidak kita bolehkan seperti apa, kita nih tak boleh di adu-adu oleh konsituen kita, karna dia banyak tukang kipas. Mungkin itu yang menjadi pemikiran saya kenapa reses ini ada sebenarnya ada niat baik dari Lembaga untuk memfailitasi kita bersyukur dan berterima kasih tetapi dalam hal pelaksanaan ini ada kesamaan kesepahaman kita untuk melaksanakan reses itu teknisnya seperti apa sehingga kita bisa disejalankan sehingga tidak diadu oleh konsituen, sehingga timbulah seperti yang pak Tarmizi khawatirkan. Kalau saya bikin hanya kue kotak nanti tak datang orang, kalau pun dating besok dia ngomel tadinya milih saya lima tahun kemudian gak milih saya lagi, itu Pimpinan. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Kalau cerita soal pikir, pikir kita sudah banyak karna kita reses sudah berapa kali. Apa yang kita masukan dalam musrenbang belum tentu keluar semua dalam pikir. Sama dengan tadi seperti yang saya bilang di reses, kita pandai-pandai jangan mandai-mandai, saya harus siapkan 3,000 orang karena suara saya 3,000 orang. Dimana-mana reses itu sudah ditentukan Provinsi harinya sekian, jumlah orangnya juga sekian. Jadi pandai-pandailah. Silahkan pak Setwan kalau mau nambah.

Drs. Muhammad Hendri, MM / Sekretaris DPRD :

Terima kasih Pimpinan, izin nanti setelah rapat ini kami akan menyiapkan Struktur APBD 2020 untuk Bapak Ibu bawa kelapangan nanti. Terkait pertanyaan pak Tarmizi, mohon maaf saya mau tidak mau harus menyampaikan bahwa kita perlu buka UU Nomor 23 tentang Pemda dan sangat jeas sekali, terkait dengan pengelolaan asset dan keuangan, kewenangannya ada di Pemda, walaupun kita satu rumah, ini sudah jelas domainnya berbeda, silahkan buka UU Nomor 23 dimana pengelolaan keuangan dan asset kewenangannya di Pemerintah Daerah artinya untuk 2 hal ini terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban sudah jelas di PP 12 UU No. 23 bahwa kami melaporkan ke Pemda per 3 bulan, bapak Ibuk mungkin tau saya lagi mengejar pertanggungjawaban, jadi kewajiban kami jelas kepada Pemda. Jadi kami secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati.

Tarmizi / Anggota Komisi I :

Tapi kami ingin tahu

Drs. Muhammad Hendri, MM / Sekretaris Dewan :

Kalau ingin tahu silahkan tapi pertanggungjawaban kami ke Bupati. Misalnya Bapak ingin tahu soal baju tinggal lihat saja di RKA nya sudah ada harganya, kita hanya pelaksanaannya saja, itu PPTK yang tahu.

Tarmizi / Anggota Komisi II :

Begini pak, bapak kan lapor ke Bupati. Apa salahnya Bapak juga melaporkan ke Dewan

Drs. Muhammad Hendri, MM / Sekretaris Dewan :

Selama ini saya Tanya kepada Setwan yang lama tidak ada itu, pak. Kami sesuai tupoksi, kami tidak melarang tapi sesuai aturan yang ada.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Itu hukumnya sunat, dikasih boleh tak dikasih juga gak apa-apa. Kita adakan pendekatan semua ada dalam kontrak. Jadi pak Tarmizi kita temui pak Setwan lalu kita minta. Pak Hasriawady disilahkan.

Hasriawady, S.IP / Anggota Komisi I :

Mungkin pak Tarmizi kurang informasi jadi wajar saja dia bertanya seperti itu. Tapi di forum yang terhormat ini seperti kata pak ketua, nanti pak Tarmizi, pak Ketua dan pak Setwan duduk sehingga tidak membuka hal-hal ini di forum ini. Kemudian terkait apa yang disampaikan oleh pak Mirwan tadi, tak perlu kita kasih apa-apa sam konsituen cukup beri kasih sayang saja dengan menemui mereka bahwa kita masih peduli dengan mereka itu sudah cukup. Saya piker tak perlu dibahas di forum ini, mungkin nanti kita sama-sama sharing diluar forum ini.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih masukannya pak Hasriawady. Silahkan ibu Fiven kalau ada yang mau disampaikan.

Hj. Fiven Sumanti, S.IP / Ketua Komisi II :

Terima kasih Pimpinan, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kami ada ketemu dengan rekan-rekan DPRD lain, mereka sedang orientasi. Saya sampaikan bahwa Bintan tidak melaksanakan orientasi karena tidak menganggarkan tentu didalam laporan disampaikan bahwa yang melaksanakan orientasi itu adalah Provinsi, tapi karna Provinsi tidak melaksanakan maka kita juga tidak melaksanakan. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa untuk Kabupaten Natuna, Tanjungpinang, Karimun, Lingga dan Bintan yang tidak ada. Saya tanyakan seperti apa mereka menganggarkan, mereka juga tidak menganggarkan, hanya mereka takut akan sanksi bahwa apabila tidak melaksanakan orientasi maka tidak boleh Bimtek. Jadi Pimpinan, coba nanti diperdalam apakah seperti itu. Berikut saya tanyakan apa yang dilakukan oleh Kota Tanjungpinang, mereka melakukan bahwa mengefisiensikan uang DL yang tersisa, dimana biaya transportasinya mereka menggunakan anggaran DL yang tersisa untuk perjalanan 30 Anggota Dewan. Sementara anggaran Bimtek ataupun pelaksanaannya menggunakan anggaran yang sudah tersedia. Tentu kita sudah menganggarkan itu yang tidak kita anggarkan adalah biaya perjalanannya. Mungkin pak Setwan, pengalaman Tanjungpinang ini bisa kita ambil untuk kita, masih ada waktu kita beberapa hari lagi. Jadi apabila mau Bimtek mesti melakukan orientasi terlebih dahulu khusus untuk Anggota yang baru dilantik. Ini yang bisa saya sampaikan Ketua berkaitan dengan kegiatan-kegiatan orientasi yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki tahun 2020 ini. Mungkin itu Ketua, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Jadi itu pak Setwan, orientasi itu juga perlu, nanti tolong ditanyakan ke Setwan Kota Tanjungpinang, mungkin ada cara-cara lain. Silahkan pak Setwan kalau ingin menanggapi.

Drs. Muhammad Hendri, MM / Sekretaris Dewan :

Terima kasih Pimpinan dan terima kasih bu Fiven. Kejadian ini adalah akibat nomenklatur tahun sebelumnya zaman pak Edy Yusri. Karena bunyinya orientasi di luar daerah dalam provinsi, sudah terkunci disitu, kemudian saya tanyakan ke PPTK kalau itu buka uangnya tidak cukup karna dianggarkan di dalam provinsi. Kota Tanjungpinang menggunakan sistem gelondongan sementara kita sudah dipisah-pisah. Seperti yang dibuat oleh provinsi bahwa diluar daerah tapi dalam provinsi. Rencana kita di awal tahun dan dibesarkan anggarannya agar tidak hanya diPalembang, dimana saja di pulau jawa begitu hasil konsultasi.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Artinya niatnya sudah ada tapi diawal tahun. Ada lagi atau sudah cukup ? Kalau sudah cukup terima kasih atas saran dan masukannya. Untuk pelaksanaan kegiatan reses tahun 2019 yang akan dilaksanakan mulai hari ini. Demikian rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang ke I Tahun 2019 pada hari ini. Selamat melaksanakan kegiatan reses kami ucapkan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin rapat Paripurna Internal dengan resmi saya nyatakan di tutup.

.....Palu diketok 3 (tiga) kali.....

Sebelum saya tutup izinkan saya menyampaikan sebaait pantun :

Wak mamad menjaring ikan,
Penuh bakul dengan kurisi,
Hari ini reses mulai dilaksanakan,
Untuk menggali pokok pikiran dan aspirasi.
Wassalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.40 wib.

NOTULIS,


NETTY NURZANNAH, A.Md
NIP.19701107 200604 2 006

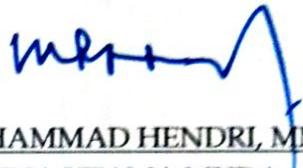
KABAG PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


RITA YUNIATI, S.Pi, MM
NIP.19720630 199803 2 010

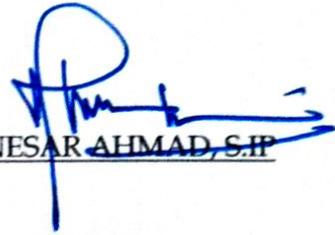
KASUBBAG PERSIDANGAN, RISALAH
DAN PUBLIKASI


SUMADIYO, SE
NIP.19740120 200604 1 003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,

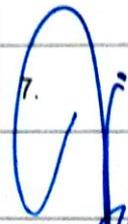
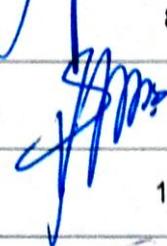
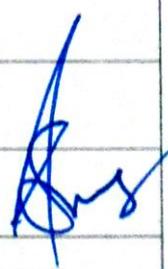
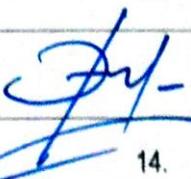
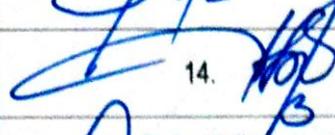
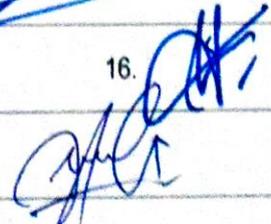
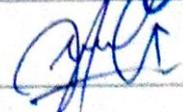

Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680508 198810 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA,


H. NESAR AHMAD, S.IP

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2019-2024**

Hari : Senin
 Tanggal : 25 November 2019
 Waktu : 15.30 s/d 15.40 wib
 Acara : Penutupan Masa Sidang I Tahun 2019

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS WIBOWO	KETUA	1.
2	H. NESAR AHMAD, S.IP	WAKIL KETUA I	2. 
3	AGUS HARTANTO, ST	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4.
5	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI II	5. 
6	MUHAMAD NAJIB	KETUA KOMISI III	6. 
7	MIRWAN	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	INDRA SETIAWAN, S.ST	WAKIL KETUA KOMISI II	8.
9	ZAKIRMAN, S.PD.I	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	HASRIAWADY, S.IP	SEKRETARIS KOMISI I	10. 
11	SUHARDI, SE	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	Hj. SITI MARYANI, S.IP	SEKRETARIS KOMISI III	12. 12/N
13	ERİYANTI, SH. MH	ANGGOTA	13. 
14	SAHAK	ANGGOTA	14. 
15	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	15. 
16	TARMIZI	ANGGOTA	16. 
17	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	17. 

18	ZULFAEFI, SE	ANGGOTA	18. <i>izin</i>
19	Hj. SRI WAHYUNI, S.Sos	ANGGOTA	19. <i>[Signature]</i>
20	ARWAN	ANGGOTA	20. <i>[Signature]</i>
21	MUTTAQIN	ANGGOTA	21. <i>[Signature]</i>
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. <i>[Signature]</i>
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23. <i>[Signature]</i>
24	Hj. AISYAH	ANGGOTA	24. <i>[Signature]</i>
25	YANTI MARYANTI	ANGGOTA	25. <i>[Signature]</i>

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA I,

[Signature]
H. NESAR AHMAD, S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,

[Signature]
Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680508 198810 1 001